



## **The Role of the Nagari Government in the Revitalization of BUMNAG Tigo Sapilin Management in Nagari Tambangan, Tanah Datar Regency**

**Rima Utari<sup>1</sup>, Artha Dini Akmal<sup>2</sup>**

[Utari0405@gmail.com](mailto:Utari0405@gmail.com)

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

### **ABSTRACT**

This research delves into the function of the Nagari Government in rejuvenating the operations of BUMNag Tigo Sapilin, located in Nagari Tambangan, Tanah Datar Regency. These restorative actions were prompted by a standstill in management and the weakening of BUMNag's accomplishments, which in turn impacted its economic input to the area. The purpose of this investigation is to depict the ways in which the Nagari Government undertakes its duties as a controller, enabler, and energizer, and also to pinpoint the difficulties experienced throughout the recovery process. Employing a qualitative research method, the gathering of information was achieved through conversations, monitoring, and the review of relevant paperwork. The results indicate that the Nagari Government has successfully executed its duties as a controller and energizer, demonstrated by actions such as creating rules and giving inspiration to the managerial staff. Nevertheless, its enabling role has not been fully realized, given that the Nagari Government has neglected to organize educational sessions or development opportunities for the newly designated BUMNag leaders. The difficulties encountered encompass both internal aspects and external elements, a scarcity of personnel, insufficient backing from the public, and restrictions on financial resources. The study determines that increasingly cohesive and enduring plans, which include developmental courses, guidance, and reinforcing public support, are required to guarantee the efficiency of BUMNag's managerial renewal and to improve its impact on the well-being of the community.

**Keywords:** BUMNag Tigo Sapilin; Dynamizer; Facilitator; Nagari Government Role; Regulator; Revitalization

### **Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup manusia serta pengentasan kemiskinan. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kemampuan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, nagari atau desa berfungsi sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, artinya setiap tindakan pembangunan yang dilakukan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat.

Untuk memperkuat pembangunan di tingkat lokal, pemerintah pusat memberikan kewenangan luas kepada pemerintah nagari melalui mekanisme otonomi daerah. Otonomi ini memungkinkan nagari mengubah dan menata kembali wilayahnya sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing. Salah satu bentuk implementasinya adalah Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), yang berfungsi sebagai instrumen makroekonomi pada tingkat awal untuk memandu pembangunan ekonomi masyarakat umum.

BUMNag hadir sebagai pendekatan baru dalam meningkatkan perekonomian desa, yang didirikan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang berbagai pelayanan ekonomi dan umum yang disediakan oleh nagari, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama antar mereka. Setiap warga negara Indonesia diharapkan memiliki minimal satu BUMNag atau BUMDes untuk mendukung usaha lokal.

Nagari Tambangan mempunyai luas wilayah 23,70 km<sup>2</sup> dan terletak di Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dengan potensi sumber air bersih yang melimpah, nagari ini terdiri dari BUMNag yang hadir di bidang pelayanan dan pengelolaan air bersih untuk masyarakat umum.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran pemerintah dalam pengelolaan BUMNag. Misalnya, Bonavidiawati Zebua dan Rizki Syafril (2023) menemukan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat dalam pembinaan BUMNag belum optimal. Penelitian lain oleh Emy Dewi Pramita dan Lailul Mursyidah (2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ketapang berperan sebagai fasilitator, katalisator, dan dinamisator dalam pengembangan BUMDes. Zamhasari dkk. (2023) juga menemukan bahwa Wali Nagari berperan dominan dalam pendirian BUMNag di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pembentukan atau pengelolaan BUMNag, bukan pada proses revitalisasi, khususnya bagi BUMNag yang mengalami stagnasi. Penelitian terkait peran pemerintah nagari sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator dalam konteks pembaruan manajemen BUMNag masih terbatas. Padahal, Nagari Tambangan memiliki potensi alam yang besar dan sumber daya manusia yang cukup kompeten, meskipun minat masyarakat untuk mengembangkan BUMNag masih rendah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Nagari dalam revitalisasi manajemen BUMNag Tigo Sapilin di Nagari Tambangan, khususnya terkait pelaksanaan peran sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengelolaan BUMNag secara komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai peran Pemerintah Nagari Tambangan dalam melaksanakan revitalisasi kepengurusan BUMNag Tigo Sapilin. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses revitalisasi berlangsung.

Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar. Objek penelitian meliputi implementasi revitalisasi manajemen BUMNag, kebijakan yang diterapkan, serta strategi yang dijalankan pemerintah nagari untuk memperbaiki dan mengembangkan BUMNag Tigo Sapilin. Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung, antara lain Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketua BPRN, pengurus BUMNag Tigo Sapilin, serta perwakilan pengurus lama.

Untuk memastikan keandalan informasi, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu perbandingan hasil wawancara dengan informan yang berbeda, catatan resmi dari pemerintah

nagari, dan temuan dari observasi lapangan. Analisis data dilakukan sesuai dengan model interaktif Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013:246), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses reduksi data melibatkan pemilihan informasi terkait berdasarkan fokus penelitian. Penyajian data menggunakan format naratif dan kutipan wawancara untuk menjelaskan penemuan. Kesimpulan dirumuskan dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mendapatkan gambaran luas mengenai peran Pemerintah Nagari Tambangan dalam revitalisasi pengelolaan BUMNag Tigo Sapilin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Tambangan menjalankan tiga peran utama dalam revitalisasi kepengurusan BUMNag Tigo Sapilin, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Mengacu pada konsep yang dikemukakan Labolo (2010), peran ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Peran Pemerintah sebagai Regulator**

Dalam menjalankan fungsi regulator, Pemerintah Nagari melakukan revisi Peraturan Nagari Tambangan Nomor 05 Tahun 2017 menjadi Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pendirian BUMNag Tigo Sapilin. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kriteria dan persyaratan calon pengurus melalui proses rekrutmen terbuka, mengangkat pengurus terpilih, dan mengesahkannya melalui Surat Keputusan (SK) Wali Nagari Nomor 06 Tahun 2025 (penetapan dewan pengawas) dan SK Nomor 05 Tahun 2025 (penetapan pelaksana operasional). Tindakan ini selaras dengan pandangan Labolo (2010) bahwa peran regulator meliputi penyusunan regulasi dan arah kebijakan sebagai acuan dasar dalam pemberdayaan masyarakat.

### **Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Sebagai fasilitator, Pemerintah Nagari Tambangan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung proses revitalisasi, termasuk penganggaran dana yang dibutuhkan. Pemerintah memfasilitasi rekrutmen pengurus baru dan menyelenggarakan musyawarah nagari untuk penetapan kepengurusan. Namun, hingga saat ini, pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus baru belum dilaksanakan, meskipun seharusnya program tersebut menjadi langkah awal setelah pelantikan. Menurut Labolo (2010), fasilitator berfungsi menyediakan kemudahan, sarana, dan prasarana yang menunjang berkembangnya kegiatan masyarakat.

### **Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

Dalam peran sebagai dinamisator, Pemerintah Nagari berupaya mendorong, memotivasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mendukung BUMNag. Pemerintah memberikan penjelasan tentang tujuan jangka panjang BUMNag kepada masyarakat agar tertarik ikut serta, sekaligus memberikan arahan strategis kepada pengurus baru untuk mengembangkan usaha ke sektor pertanian, mengingat mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Hal ini sejalan dengan pernyataan Labolo (2010) bahwa dinamisator bertugas menggerakkan partisipasi masyarakat guna menjaga dinamika pembangunan daerah.

### **Kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari dalam melakukan revitalisasi kepengurusan BUMNag Tigo Sapilin**

Proses revitalisasi kepengurusan BUMNag Tigo Sapilin di Nagari Tambangan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan ini tidak hanya berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program, tetapi juga berdampak langsung terhadap capaian tujuan revitalisasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kendala tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **Faktor internal dan eksternal**

Kendala internal mencakup permasalahan yang bersumber dari dalam tubuh pemerintahan nagari dan BUMNag itu sendiri. Kendala internal yang terjadi adalah kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemerintah nagari dan pengurus lama BUMNag kurang melakukan komunikasi dan koordinasi sebelum proses revitalisasi dimulai. Hal ini menyebabkan banyak informasi penting, seperti catatan keuangan, laporan kegiatan, dan strategi usaha sebelumnya, tidak tersampaikan secara lengkap kepada pengurus baru. Akibatnya, pengurus baru harus memulai dari nol tanpa bekal data yang memadai. Selain itu Minimnya Dokumen Perencanaan Strategis juga menjadi kendala internal yang di hadapi pemerintah nagari dan pengurus BUMNag, dokumen perencanaan BUMNag sebelumnya tidak memuat analisis potensi nagari secara komprehensif. Banyak potensi lokal yang belum diidentifikasi secara sistematis, sehingga pemerintah perlu melakukan pemetaan ulang dari awal, yang memakan waktu dan sumber daya.

Hambatan eksternal berasal dari lingkungan di luar pemerintahan nagari dan BUMNag, yang bersifat tidak langsung tetapi berdampak signifikan. Pada proses revitalisasi dan pengembangan BUMNag Tigo Sapilin yang menjadi kendala eksternal adalah Persaingan Usaha di Tingkat Lokal. Salah satu unit usaha BUMNag, yaitu penyewaan tenda pesta, mengalami kesulitan bersaing dengan penyedia jasa dari luar nagari. Penyebab utamanya adalah fasilitas yang dimiliki BUMNag belum lengkap dan kalah dari segi variasi perlengkapan. Masyarakat cenderung memilih penyedia jasa dengan kelengkapan lebih baik, walaupun berasal dari luar daerah.

### **Sumber Daya Manusia**

Pengurus baru umumnya belum memiliki keterampilan teknis dan manajerial yang memadai. Kurangnya Pengetahuan Manajemen Usaha membuat banyak pengurus belum memahami konsep dasar perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, maupun analisis peluang usaha. Selain itu Tidak Ada Program Pelatihan Formal hingga penelitian ini dilakukan, belum ada pelatihan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk pengurus baru. Akibatnya, mereka harus belajar secara otodidak, yang seringkali membuat pengembangan usaha berjalan lambat dan minim inovasi.

### **Dukungan Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan revitalisasi. Namun, di Nagari Tambangan, dukungan ini tergolong rendah. Kurangnya Rasa Memiliki dan minimnya minat bergabung sebagai pengurus menampakkan tidak adanya dukungan masyarakat terhadap BUMNag. Sebagian besar warga menganggap BUMNag adalah tanggung jawab pemerintah dan pengurus semata. Mereka tidak melihat keterlibatan sebagai suatu kewajiban atau peluang untuk ikut memajukan ekonomi nagari. Pada saat rekrutmen terbuka, minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sangat rendah meskipun prosesnya transparan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya BUMNag.

### **Ketersediaan Anggaran**

Ketersediaan anggaran memegang peran penting dalam mendukung proses revitalisasi dan pengembangan usaha BUMNag. Alokasi Dana yang Terbatas mengakibatkan ruang gerak inovasi BUMNag menjadi terbatas dan sempit. Meskipun dana desa mencakup biaya revitalisasi awal, anggaran pengembangan ke depan harus berbagi dengan program pembangunan fisik dan kegiatan prioritas lainnya di nagari. Terbatasnya dana membuat pengurus kesulitan melakukan inovasi, promosi, atau ekspansi usaha ke bidang baru, padahal peluang usaha di Nagari Tambangan cukup beragam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Nagari dalam revitalisasi kepengurusan BUMNag Tigo Sapilin di Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa pemerintah nagari menjalankan tiga fungsi pokok, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Meski demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, khususnya pada fungsi fasilitator. Pemerintah belum menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi pengurus baru, padahal kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kemampuan pengembangan usaha BUMNag. Regulator: Pemerintah telah menyusun peraturan nagari tentang pendirian BUMNag, merumuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), menetapkan kriteria dan persyaratan pengurus, serta mengesahkan pengurus dan pengawas melalui surat keputusan resmi. Fasilitator: Pemerintah memfasilitasi proses revitalisasi mulai dari evaluasi pengurus lama hingga penetapan pengurus baru, menyediakan alokasi anggaran, serta memfasilitasi pelaksanaan musyawarah nagari. Namun, belum ada penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, maupun penyuluhan yang diperuntukkan bagi pengurus baru. Dinamisator: Pemerintah memberikan dorongan motivasi, menyampaikan strategi pengembangan usaha, dan mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam pengelolaan BUMNag.

Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Tambangan dalam melakukan revitalisasi kepengurusan BUMNAG Tigo Sapilin terlihat dari faktor internal dan eksternal, sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan ketersediaan anggaran. Kendala yang dihadapi selama proses revitalisasi meliputi: Faktor Internal – Lemahnya koordinasi antara pemerintah nagari dengan pengurus lama, serta minimnya perencanaan strategis yang memuat analisis potensi desa secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan proses revitalisasi harus dimulai dengan pemetaan ulang potensi nagari. Faktor Eksternal – Adanya persaingan usaha di tingkat lokal, misalnya dalam penyewaan tenda pesta, di mana BUMNag kalah bersaing karena kelengkapan fasilitas yang terbatas. Keterbatasan Sumber Daya Manusia – Pengurus baru belum memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan strategi pengembangan unit bisnis. Tanpa pelatihan formal, mereka cenderung mempertahankan usaha yang ada tanpa inovasi baru. Rendahnya Dukungan Masyarakat – Masyarakat menganggap BUMNag sepenuhnya tanggung jawab pemerintah dan pengurus, sehingga partisipasi untuk menjadi pengurus maupun mendukung program usaha masih sangat rendah. Keterbatasan Anggaran – Meskipun dana desa dapat menutupi biaya revitalisasi awal, pengembangan usaha ke depan terhambat karena anggaran harus bersaing dengan program pembangunan fisik dan kegiatan prioritas lainnya.

## Saran

Untuk mengoptimalkan revitalisasi dan pengelolaan BUMNag Tigo Sapilin, Pemerintah Nagari disarankan untuk: Memperkuat peran fasilitator melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengurus baru, mencakup manajemen usaha, keuangan, inovasi, dan pemasaran. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah nagari, pengurus lama, dan pengurus baru agar transfer pengetahuan berjalan lancar. Mengembangkan strategi usaha berbasis potensi lokal seperti pertanian, jasa, dan pariwisata. Mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi rutin untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap BUMNag. Mencari sumber pembiayaan alternatif agar pengembangan usaha tidak terhambat keterbatasan dana desa. Dengan langkah ini, BUMNag diharapkan mampu berkembang lebih baik, memberikan manfaat ekonomi, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. syakir Media Press.  
<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/8793/buku-metode-penelitian-kualitatif.htm>
- Akib. Haedar. 2009. Dasar-Dasar Teori Organisasi. Makassar: BP UNM
- Aneta, Yanti. 2019. Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Studi Kasus di PT. PLN Area Gorontalo. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Ashby, Franklin C. 1999. Revitalize Your Corporate Culture, Houston: Cashman Dudley
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, Malang.
- Farida N. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa
- Gouillart, Francis J & James N. Kelly.1995. Transforming The Organization. New York: Mc Graw Hill, Inc
- Herdiansyah, H. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
- Husni, M. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari. Jakarta: Rajawali Pers
- Labolo, M. (2010). Memahami ilmu pemerintahan suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, H. (2021). Strategi Pengembangan BUMDes Berbasis Komunitas. Bandung: Alfabeta
- Riyanto, A. (2022). Kepemimpinan dan Manajemen BUMNag. Semarang: Unnes Press
- Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Penerbit Alfabeta Bandung. <https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?fstream&fid=140&bid=1879>
- Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES. Jakarta: UAI Press
- Syahrul. (2020). Manajemen Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arumdani, N., & Kriswibowo, A. (2022). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora). <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i2.55>

- Bonavidiawati Zebua., Rizki Syafril. 2023. peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Sumatera Barat Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMnag. *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*. Vol 7, No 1 (222-233)
- Boni Saputra., Dkk. 2020. Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4, No. 4 Desember 2020 (743-753)
- Emy Dewi Pramita., Lailul Mursyidah. 2023. The Role of the Ketapang Village Government In the Development of Califour BUMDes : Peran Pemerintah Desa Ketapang Dalam Pengembangan BUMDes Califour. *Indonesian Journal of Public Policy Review* Vol 22 (1-10)
- Fauzan Zakir. 2021. Mengenal Sistem Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Ensiklopedia of Journal*. Vol 3, No 5 (53-57)
- Ferdi Harobu. 2019. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 8, No 4 (367-371)
- Fitroh Hanrahmawan. 2010. Revitalisasi Manajemen Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Balai Latihan Kerja Industri Makkassar). *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 (78-94)
- Handayani, D., Afriyenti, M., Zulfia, Y., & Deviani, D. (2022). Penguatan pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia badan usaha milik nagari (bumnag) di nagari talang babungo, kab. solok. Selaparang. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.12127>
- Lantaeda. SB. Dkk. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 4. No. 048
- Prastiwi, J. H., & Ulfah, I. F. (2022). Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur. *Sosial Politik: Jurnal Sosial Politik*. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412>
- Rahmat, D., Tsamrotul Fuadah, A., & Rosyidin, U. (2022). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng. <https://doi.org/10.37949/mimbar18223>
- Risa. Y Dkk 2019. Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupa Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 4. No. 2. (197-199)
- Safitri, Anisa., Jumiati. 2020. Efektivitas Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Kataping Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. Vol 2. No. 2. (90-97)
- Zamhasari., Dkk. 2023. Dominasi Peran Wali Nagari Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAGARI). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. Vol.2, No.11 (4329-4340)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Wali Nagari Tambangan Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Tigo Sapilin